KOORDINASI LINTAS SEKTOR PADA PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN MAMUJU

Firkatunnajia
NPP. 33.1012
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email: firkaaa137@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ida Yunari Ristiani, SKM., MM
Email: idayunariristiani@ipdn.ac.id

Abstract

Problem Statement: *Cross-sector coordination in earthquake disaster rehabilitation and reconstruction programs remains a significant challenge in Indonesia, particularly in post-disaster regions with multi-agency involvement. The 2021 Mamuju earthquake exposed weaknesses in inter-agency coordination between BPBD and Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan), which hampered the effectiveness of rehabilitation efforts.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze cross-sector coordination in the earthquake disaster rehabilitation and reconstruction program for victims in Mamuju Regency.* ***Method:*** *This research used a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation, and data analysis followed the Miles and Huberman model. The research was grounded in Hasibuan's coordination theory encompassing unity of action, communication, task division, and discipline dimensions. The number of informants in this study was 12 informants, including: Head of BPBD Mamuju Regency, Head of Perkimtan Service of Mamuju Regency, Secretary of BPBD Mamuju Regency, Head of Rehabilitation and Reconstruction Division of BPBD Mamuju Regency, Head of Housing Division of Perkimtan Service of Mamuju Regency, Technical Staff of Perkimtan Service of Mamuju Regency, Field Staff of BPBD Mamuju Regency and 5 informants from the community.* ***Result:*** *The results indicate that coordination between BPBD and Dinas Perkimtan in Mamuju Regency has been carried out through regular meetings, joint field monitoring, and data sharing mechanisms. However, constraints related to overlapping authority, limited human resources, and incomplete damage data continue to hinder the optimal implementation of rehabilitation and reconstruction programs.* ***Conclusion:*** *Cross-sector coordination in Mamuju Regency's earthquake rehabilitation and reconstruction program requires strengthening through clearer authority division, improved communication systems, and more integrated institutional capacity.*

Keywords: *Cross-Sector Coordination; Earthquake Disaster; Mamuju Regency; Reconstruction; Rehabilitation.*

Abstrak

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Koordinasi lintas sektor dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa bumi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, khususnya di daerah pascabencana yang melibatkan banyak instansi. Gempa bumi Mamuju tahun 2021 mengungkap kelemahan koordinasi antarinstansi antara BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) yang menghambat efektivitas upaya rehabilitasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi lintas sektor pada program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis penelitian didasarkan pada teori koordinasi Hasibuan yang mencakup dimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, dan disiplin. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 informan antara lain : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mamuju, Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju, Sekretaris BPBD Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Mamuju, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju, Staf Teknis Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju, Staf Lapangan BPBD Kabupaten Mamuju dan 5 informan dari masyarakat. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara BPBD dan Dinas Perkimtan di Kabupaten Mamuju telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi berkala, monitoring lapangan bersama, dan mekanisme berbagi data. Namun, kendala terkait tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidaklengkapan data kerusakan masih menghambat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara optimal. **Kesimpulan:** Koordinasi lintas sektor dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi di Kabupaten Mamuju memerlukan penguatan melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas, peningkatan sistem komunikasi, dan kapasitas kelembagaan yang lebih terpadu.

Kata kunci: Bencana Gempa Bumi; Kabupaten Mamuju; Koordinasi Lintas Sektor; Rekonstruksi; Rehabilitasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi kehidupan masyarakat, baik dari sisi jiwa, harta benda, maupun infrastruktur. Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, memiliki tingkat kerawanan gempa bumi yang sangat tinggi (Sri Heryati, 2020). Kondisi ini menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional yang membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari berbagai instansi pemerintah.

Pada tanggal 15 Januari 2021, gempa bumi berkekuatan 6,2 Magnitudo mengguncang Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa, ribuan orang luka-luka, dan puluhan ribu unit rumah

mengalami kerusakan dari tingkat ringan hingga berat. Berdasarkan data BNPB, total kerugian akibat bencana gempa bumi Mamuju mencapai triliunan rupiah yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari perumahan, fasilitas umum, infrastruktur, hingga perekonomian masyarakat (Ristiani, 2020). Kondisi ini menuntut adanya program rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyeluruh, cepat, dan tepat sasaran.

Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku leading sector penanggulangan bencana dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) sebagai instansi teknis pembangunan perumahan menjadi kunci keberhasilan program tersebut (Eviany & Sutiyo, 2023). Tanpa koordinasi yang baik, program rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko berjalan tidak sinkron, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan tidak tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat terdampak tidak terpenuhi secara optimal.

Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana mencakup berbagai aspek, mulai dari pendataan korban dan kerusakan, perencanaan program, distribusi bantuan, hingga pembangunan kembali permukiman warga. Menurut Hasibuan (2006), koordinasi yang efektif dicirikan oleh adanya kesatuan tindakan, kelancaran komunikasi antarinstansi, pembagian tugas yang jelas, serta disiplin dalam pelaksanaan program. Namun dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor di daerah pascabencana sering kali menemui berbagai hambatan, seperti perbedaan pemahaman prosedur, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan fragmentasi data yang menyulitkan pengambilan keputusan (Dimaputri, 2023).

Kompleksitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya terletak pada besarnya kerusakan yang harus dipulihkan, tetapi juga pada banyaknya aktor yang terlibat dalam proses pemulihan. Program rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup berbagai sektor, seperti perumahan, infrastruktur, pelayanan publik, sosial ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan program pemulihan pascabencana sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi dan koordinasi yang efektif antarlembaga. Dalam konteks ini, koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelarasan tugas dan kewenangan, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak secara tepat dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi multipihak memiliki peran strategis dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana, terutama dalam penyusunan perencanaan, pembagian sumber daya, dan pelaksanaan program rekonstruksi (Rozikin, 2024).

Pada kerangka penanggulangan bencana di Indonesia, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahapan yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan masyarakat serta membangun kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Tahapan ini sering kali dianggap sebagai fase yang paling kompleks karena melibatkan proses perencanaan, pendanaan, pengawasan, dan implementasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan. Kompleksitas tersebut mengharuskan adanya integrasi kebijakan dan sinergi antarinstansi agar proses pemulihan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka berpotensi menimbulkan keterlambatan pembangunan, ketidaktepatan

sasaran bantuan, pemborosan sumber daya, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hayat, 2019).

Kabupaten Mamuju sebagai wilayah yang terdampak paling signifikan akibat gempa bumi tahun 2021 menghadapi tantangan besar dalam proses pemulihan pascabencana. Kerusakan yang terjadi pada sektor perumahan menuntut adanya kerja sama yang erat antara BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan rehabilitasi hunian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kedua instansi tersebut harus mampu menyelaraskan perencanaan, pendataan kerusakan, verifikasi penerima bantuan, serta pelaksanaan pembangunan rumah tahan gempa sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Kegagalan dalam menyelaraskan berbagai proses tersebut dapat menghambat percepatan pemulihan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak (Opdyke et al., 2017).

Pentingnya koordinasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi juga ditegaskan dalam berbagai penelitian terdahulu. Syuaib (2023) menjelaskan bahwa kolaborasi antarinstansi pemerintah merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Keberadaan jaringan kebijakan dan inovasi yang kuat memungkinkan setiap instansi menjalankan perannya secara optimal sekaligus meminimalkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Selain itu, Rahmatika, Sutisna, dan Budiarto (2023) menemukan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan fase penanggulangan bencana yang paling kompleks sehingga membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, berbagai studi juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam penanganan pascabencana masih sering menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi perbedaan kepentingan organisasi, keterbatasan sumber daya, ketidakselarasan data, lemahnya sistem informasi, serta kurang jelasnya pembagian kewenangan antarinstansi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme koordinasi antarinstansi berlangsung dalam praktik, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat koordinasi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (Setyawati, 2024; Nugraheni et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai koordinasi antara BPBD dan Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju menjadi penting untuk dilakukan. Selain memberikan gambaran mengenai pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan manajemen bencana serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan bencana pada masa yang akan datang. Penelitian terdahulu mengenai koordinasi penanggulangan bencana umumnya berfokus pada aspek manajemen kedaruratan atau kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis koordinasi lintas sektor pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi, khususnya di Kabupaten Mamuju, masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara

mendalam bagaimana koordinasi antara BPBD dan Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju berlangsung dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana gempa bumi 2021.

1.2 Kesenjangan Masalah

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Kabupaten Mamuju melibatkan banyak instansi dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda. Idealnya, koordinasi lintas sektor mampu menghasilkan sinkronisasi data, pembagian peran yang jelas, dan pelaksanaan program yang terintegrasi sehingga seluruh korban bencana mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi secara merata dan tepat waktu. Namun kenyataannya, masih terdapat permasalahan tumpang tindih kewenangan antara BPBD dan Dinas Perkimtan, ketidaklengkapan data kerusakan di lapangan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang berdampak pada lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep koordinasi yang ideal dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun mekanisme koordinasi formal telah tersedia melalui rapat-rapat koordinasi dan peraturan perundang-undangan, implementasinya masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung koordinasi lintas sektor serta merumuskan upaya perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Mamuju.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan koordinasi lintas sektor pada program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan memperkuat kajian manajemen kebencanaan dan koordinasi kelembagaan, khususnya terkait dimensi koordinasi Hasibuan dalam konteks penanggulangan bencana. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi BPBD, Dinas Perkimtan, dan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor pada program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa kajian terdahulu yang relevan. Ristiani (2020) mengkaji manajemen kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kabupaten Sumedang dengan pendekatan kualitatif, menemukan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan sinergi antarinstansi yang kuat. Dimaputri (2023) meneliti optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan, menekankan pentingnya partisipasi komunitas dan koordinasi pemerintah. Bertha Lubis (2024) menganalisis ketahanan masyarakat dalam penanganan bencana banjir dengan fokus pada peran pemerintah daerah. Eviany dan Sutiyo (2023) membahas perlindungan masyarakat dan manajemen kebencanaan secara komprehensif. Khairunnisa dan Anggara Putri (2024) mengkaji strategi pemadaman kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Bantul. Muzdalifah (2023) mengkaji efektivitas koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana banjir dan menemukan bahwa koordinasi vertikal maupun horizontal telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala berupa ego sektoral antarinstansi. Bakti dan

Fadlurrahman (2020) meneliti koordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo dan menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik serta kerja sama antarorganisasi perangkat daerah. Murni dan Alhadi (2019) menganalisis efektivitas koordinasi antarstakeholders oleh BPBD Kota Padang dan menemukan bahwa koordinasi yang efektif didukung oleh komunikasi yang intensif serta kesamaan tujuan di antara para pemangku kepentingan.

Penelitian oleh Setiawan dkk. (2024) meneliti peranan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Balikpapan dan menemukan bahwa BPBD memiliki peran penting dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, Syahrani dkk. (2025) mengkaji peran BPBD dalam penanggulangan pascabencana banjir di Kota Cimahi dan menyimpulkan bahwa BPBD berperan strategis, meskipun masih menghadapi berbagai kendala koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, penelitian mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pascatsunami di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sangat dipengaruhi oleh sinergi antarinstansi serta keterlibatan masyarakat.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi, komunikasi yang efektif, serta sinergi kelembagaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan penanggulangan bencana. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji koordinasi antara BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan faktor krusial dalam penanggulangan bencana yang efektif.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena secara khusus mengkaji koordinasi lintas sektor pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Kabupaten Mamuju, menggunakan teori koordinasi Hasibuan (2006) dengan empat dimensi utama: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, dan disiplin. Berbeda dari penelitian sebelumnya yakni penelitian Ristiani (2020), Dimaputri (2023) dan penelitian terdahulu yang sudah saya bahas sebelumnya yang lebih banyak membahas fase kedaruratan atau mitigasi, penelitian ini memfokuskan pada fase pascabencana yang belum banyak diteliti secara spesifik di wilayah Sulawesi Barat. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis visualisasi NVivo 12 untuk memetakan pola koordinasi antarinstansi secara lebih sistematis.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi lintas sektor pada program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam

proses koordinasi lintas sektor dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju, termasuk hambatan, faktor pendukung, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam program koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Informan kunci terdiri dari Kepala BPBD Kabupaten Mamuju, Kepala Dinas Perkimtan, serta pejabat teknis di kedua instansi. Informan pendukung meliputi aparat kelurahan dan masyarakat penerima manfaat program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak NVivo 12 dalam memetakan frekuensi kata dan pola tematik hasil wawancara. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada bulan Oktober hingga November 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Koordinasi BPBD dan Dinas Perkimtan di Kabupaten Mamuju

Penulis menganalisis koordinasi lintas sektor pada program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju menggunakan teori koordinasi Hasibuan yang menekankan empat dimensi utama, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, dan disiplin. Berikut pembahasan masing-masing dimensi.

3.1.1 Kesatuan Tindakan

Dimensi kesatuan tindakan berkaitan dengan kemampuan berbagai instansi untuk bergerak secara sinergis menuju tujuan bersama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD dan Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju telah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama secara berkala, khususnya pada tahap perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program. Rapat-rapat tersebut berfungsi sebagai forum penyamaan persepsi dan penetapan prioritas kerja antarinstansi.

Namun demikian, kesatuan tindakan di lapangan belum sepenuhnya terwujud. Masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai standar teknis bangunan antara BPBD yang berorientasi pada penanganan kedaruratan dan Dinas Perkimtan yang mengacu pada regulasi teknis perumahan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan lapangan dan berimbas pada tidak meratanya distribusi bantuan rekonstruksi kepada seluruh korban bencana.

3.1.2 Komunikasi

Komunikasi antarinstansi merupakan fondasi utama koordinasi yang efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antara BPBD dan Dinas Perkimtan telah berjalan melalui saluran formal berupa surat-menyurat resmi, pertemuan koordinasi, dan laporan berkala. Selain itu, komunikasi informal melalui aplikasi pesan singkat juga aktif digunakan untuk mempercepat pertukaran informasi di lapangan.

Kendati demikian, ditemukan hambatan komunikasi berupa ketidaktepatan waktu penyampaian data kerusakan dari tingkat kelurahan ke instansi teknis, yang mengakibatkan data rekonstruksi tidak mutakhir. Selain itu, keterbatasan personel yang bertugas sebagai penghubung antarinstansi menyebabkan aliran informasi tidak selalu berjalan lancar, terutama pada periode puncak kegiatan lapangan.

3.1.3 Pembagian Tugas

Berdasarkan regulasi, BPBD bertugas sebagai koordinator utama penanggulangan bencana sedangkan Dinas Perkimtan bertanggung jawab atas aspek teknis rekonstruksi perumahan. Namun dalam implementasinya, pembagian tugas ini tidak selalu berjalan tegas. Terdapat sejumlah fungsi yang dikerjakan oleh kedua instansi secara bersamaan tanpa kejelasan koordinasi, seperti pendataan kerusakan rumah dan verifikasi calon penerima bantuan.

Tabel 1 berikut menyajikan gambaran pembagian tugas utama antara BPBD dan Dinas Perkimtan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Mamuju:

Tabel 1
Pembagian Tugas BPBD dan Dinas Perkimtan dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Instansi	Tugas Utama
1.	BPBD Kabupaten Mamuju	Koordinasi penanggulangan bencana, pendataan korban, distribusi bantuan darurat, monitoring lapangan, dan pelaporan kepada BNPB
2.	Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju	Asesmen kerusakan bangunan, perencanaan teknis rekonstruksi, pengawasan pembangunan rumah, dan verifikasi penerima bantuan rekonstruksi
3.	Dinas Sosial	Pendataan korban rentan, distribusi bantuan sosial, dan pendampingan psikososial korban bencana
4.	Dinas PU	Rekonstruksi infrastruktur publik, jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi

Sumber: BPBD dan Dinas Perkimtan Kabupaten Mamuju, 2026

3.1.4 Disiplin

Dimensi disiplin berkaitan dengan kepatuhan seluruh instansi terhadap prosedur, jadwal, dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat disiplin dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Mamuju masih perlu ditingkatkan. Beberapa agenda rapat koordinasi tidak terlaksana sesuai jadwal karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang harus merangkap berbagai tugas lapangan secara bersamaan.

Ketidakdisiplinan dalam penyampaian laporan perkembangan program juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Beberapa instansi mitra tidak menyerahkan laporan tepat waktu, sehingga menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh

BPBD selaku koordinator utama. Kondisi ini memperkuat urgensi penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam koordinasi lintas sektor pascabencana.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi telah berlangsung melalui berbagai mekanisme formal maupun informal. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi, pertukaran data, penyusunan rencana kerja bersama, serta komunikasi berkelanjutan selama pelaksanaan program. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perbedaan data penerima bantuan, perubahan kebijakan teknis dari pemerintah pusat, keterbatasan sistem informasi, serta tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan tugas tertentu.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bakti dan Fadlurrahman (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan kerja sama antarorganisasi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, komunikasi terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan koordinasi antara BPBD dan Dinas Perkimtan, khususnya dalam proses sinkronisasi data, penyelesaian permasalahan teknis di lapangan, dan percepatan pengambilan keputusan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Murni dan Alhadi (2019) yang menemukan bahwa efektivitas koordinasi antarstakeholder dipengaruhi oleh kesamaan tujuan, komitmen bersama, dan kemampuan para aktor untuk menyelaraskan kepentingan kelembagaan demi tercapainya tujuan program.

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Ristiani (2020) yang menegaskan bahwa efektivitas koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh kejelasan peran, kelengkapan data, dan dukungan sumber daya yang memadai. Dalam penelitian ini, ketidakselarasan data dan belum optimalnya pembagian peran pada beberapa tahapan pelaksanaan program menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi. Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian Dimaputri (2023) yang menyatakan bahwa fragmentasi kelembagaan merupakan salah satu hambatan utama dalam program pemulihan pascabencana. Perbedaan orientasi kelembagaan antara BPBD yang berfokus pada aspek penanggulangan bencana dan Dinas Perkimtan yang berfokus pada standar teknis pembangunan perumahan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesatuan tindakan.

Jika dianalisis menggunakan teori koordinasi Hasibuan (2006), dimensi komunikasi, kesatuan tindakan, pembagian kerja, dan disiplin merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan koordinasi antarinstansi. Dari keempat dimensi tersebut, kesatuan tindakan menjadi aspek yang paling krusial dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Kabupaten Mamuju. Perbedaan persepsi, prioritas program, dan pendekatan teknis antarinstansi berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan apabila tidak didukung oleh koordinasi yang kuat. Lebih lanjut, temuan mengenai hambatan komunikasi dalam penelitian ini mendukung pandangan Alexander et al. (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas koordinasi dalam penanggulangan bencana sangat bergantung pada kualitas sistem informasi dan kelancaran aliran data antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian ini juga memperkuat

pendapat Comfort et al. (2020) bahwa pengembangan sistem komunikasi yang terpadu dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, temuan mengenai tumpang tindih kewenangan antarinstansi sejalan dengan pandangan Tierney (2019) yang menegaskan bahwa kejelasan yurisdiksi dan pembagian kewenangan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya koordinasi yang efektif dalam manajemen bencana yang kompleks.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi berbagai temuan penelitian terdahulu mengenai pentingnya komunikasi, kerja sama, dan kesatuan tindakan dalam penanggulangan bencana, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan mengkaji secara spesifik koordinasi antara BPBD dan Dinas Perkimtan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi. Temuan ini menunjukkan bahwa teori koordinasi Hasibuan (2006) masih relevan digunakan untuk menganalisis hubungan kerja antarinstansi pemerintah dalam konteks pemulihan pascabencana serta menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi lintas sektor di Kabupaten Mamuju.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan sejumlah temuan menarik yang memperkaya pemahaman terhadap koordinasi lintas sektor. Tabel 2 berikut menyajikan faktor penghambat dan pendukung koordinasi lintas sektor pada program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Mamuju berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen:

Tabel 2
Faktor Penghambat dan Pendukung Koordinasi Lintas Sektor di Kabupaten Mamuju

Faktor	Penghambat	Pendukung
Sumber Daya Manusia	Keterbatasan personel teknis yang kompeten dalam asesmen kerusakan bangunan pascagempa	Adanya tenaga ahli dari Kementerian PUPR yang diturunkan untuk membantu rekonstruksi
Data dan Informasi	Ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data kerusakan rumah di tingkat lapangan	Penggunaan sistem informasi BPBD untuk integrasi data korban dan kerusakan
Regulasi	Tumpang tindih kewenangan antara BPBD dan Dinas Perkimtan dalam pendataan dan verifikasi	Adanya regulasi BNPB yang menjadi acuan bersama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi
Anggaran	Keterlambatan pencairan dana stimulan rekonstruksi yang menghambat proses pembangunan	Dukungan anggaran APBN melalui dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Sumber: Hasil Penelitian, 2026

Untuk mengatasi berbagai hambatan koordinasi yang ditemukan, BPBD Kabupaten Mamuju telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, antara lain: pembentukan Tim Terpadu Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang melibatkan perwakilan dari seluruh instansi terkait, penerapan sistem pendataan digital berbasis aplikasi PUSDALOPS, serta penguatan kapasitas personel melalui pelatihan teknis asesmen bangunan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan untuk memperbaiki mekanisme koordinasi pascabencana di Kabupaten Mamuju.

Upaya penguatan koordinasi ini sejalan dengan rekomendasi Kusumasari et al. (2010) yang menekankan pentingnya pembentukan struktur koordinasi yang adaptif dan responsif dalam penanggulangan bencana. Keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada akhirnya sangat bergantung pada kemauan seluruh instansi untuk melampaui batas-batas kelembagaan formal dan bekerja secara kolaboratif demi kepentingan masyarakat korban bencana.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa koordinasi lintas sektor pada program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju telah dilaksanakan melalui mekanisme rapat koordinasi berkala, monitoring lapangan bersama, dan berbagi data antarinstansi. Namun, koordinasi tersebut masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan antara BPBD dan Dinas Perkimtan, ketidaklengkapan data kerusakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan pencairan dana stimulan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain pembentukan Tim Terpadu, penerapan sistem pendataan digital, dan pelatihan kapasitas personel teknis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya difokuskan di Kabupaten Mamuju serta keterbatasan waktu penelitian sehingga hasil penelitian belum dapat merepresentasikan seluruh dinamika koordinasi lintas sektor secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mencakup wilayah yang lebih luas dengan membandingkan koordinasi lintas sektor di beberapa daerah terdampak bencana gempa bumi, serta menggunakan pendekatan mixed method untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan, data, dan bantuan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian ini, serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alexander, D. E., Magni, M., & Tafuro, A. (2019). Inter-organizational coordination and disaster risk reduction: Challenges and opportunities. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 35*, 101068. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101068

Bakti, I., & Fadlurrahman, L. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Purworejo. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 33–48. https://doi.org/10.30596/jiap.v8i1.4412

Bertha Lubis, M. (2024). Community Resilience In Handling Flood Disaster. *Pemerintahan Dan Keamanan Publik, 6*(2), 142–156. https://doi.org/10.33701/jpkp.v6i2.4528

Comfort, L. K., Kapucu, N., Ko, K., Menoni, S., & Siciliano, M. (2020). Crisis decision-making on a global scale: Transition from cognition to collective action under threat of COVID-19. *Public Administration Review, 80*(4), 616–622. https://doi.org/10.1111/puar.13252

Dimaputri, A. M. (2023). Optimalisasi Kampung Siaga Bencana Dalam Mitigasi Bencana Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 5*(2), 139–160. https://doi.org/10.33701/jpkp.v5i2.3762

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan.* PT. Nas Media Indonesia. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo Eva perlindungan masyarakat.pdf

Hayat, E. (2019). *A framework for reconstruction of road infrastructure after a disaster*. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 10(2–3), 151–166. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-03-2017-0018

Hasibuan, M. S. P. (2006). Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah. Bumi Aksara.

Khairunnisa, R., & Anggara Putri, N. (2024). Fire Fighting and Rescue Strategy in Fire Disaster Handling in Bantul Regency. *JP Dan KP, 6*(2), 114–128. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/4611

Kusumasari, B., Alam, Q., & Siddiqui, K. (2010). Resource capability for local government in managing disaster. *Disaster Prevention and Management, 19*(4), 438–451. https://doi.org/10.1108/09653561011070367

Murni, T., & Alhadi, Z. (2019). Efektivitas koordinasi antar stakeholders oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Jurnal Pembangunan Nagari, 4(1), 15–28. https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.172

Muzdalifah. (2023). Efektivitas koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan bencana banjir. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2), 98–112. https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2091

Nugraheni, D., Saragih, H. J. R., Kusuma, K., Setiawibawa, R., Kurniadi, A., & Supriatna, A. (2024). *Model komunikasi bencana "Table Top Exercise" dengan kolaborasi multi pihak dalam pemulihan pascabencana*. Indonesian Journal of Environment and Disaster, 4(2). https://doi.org/10.20961/ijed.v4i2.2308

Opdyke, A., Lepropre, F., Javernick-Will, A., & Koschmann, M. (2017). *Inter-organizational resource coordination in post-disaster infrastructure recovery*. Construction Management and Economics, 35(8–9), 514–530. https://doi.org/10.1080/01446193.2016.1247973

Rahmatika, N. I., Sutisna, S., & Budiarto, A. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami tahun 2018 di Kabupaten Pandeglang*. Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan, 2(2). https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.595

Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang. *Pemerintahan Dan Keamanan Publik, 2*(2), 126–138. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113

Rozikin, M. (2024). *Multi-stakeholder communication and coordination systems in post-disaster socio-economic recovery collaboration*. Jurnal Studi Komunikasi, 8(2). https://doi.org/10.25139/jsk.v8i2.7665

Setiawan, A., Prasetyo, B., & Wahyuni, D. (2024). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Balikpapan. Jurnal Identifikasi, 10(1), 55–70. https://doi.org/10.31866/identifikasi.v10i1.3812

Setyawati, L. A. (2024). *Rehabilitation and reconstruction emergency response management*. Information, Communications, and Disaster, 1(2). https://doi.org/10.61511/icd.v1i2.2024.1924

Syahrani, F., Siddha, R., & Fujilestari, D. (2025). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan pascabencana banjir di Kota Cimahi. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.25077/jakp.12.1.1-16.2025

Syuaib, M. R. (2023). *Policy and innovation network: A study of inter-agency collaboration in post-disaster rehabilitation and reconstruction in Central Sulawesi, Indonesia*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(2). https://doi.org/10.26618/ojip.v13i2.11567

Tierney, K. (2019). Disasters: A Sociological Approach. *Polity Press*. https://doi.org/10.2307/j.ctt1bgzb1d

Waugh, W. L., & Streib, G. (2006). Collaboration and leadership for effective emergency management. *Public Administration Review, 66*(s1), 131–140. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00673.x